



BAB VI PENANGANAN PANDEMI COVID-19

VI.1 *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam rangka mengatasi dampak perkembangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penanganan di bidang kesehatan dan pemulihan perekonomian nasional melalui:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengambil tindakan dan menginstruksikan kepada Kepala Daerah untuk melakukan penanganan dengan melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengarahkan penggunaan Dana Transfer Umum paling sedikit 25% dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antardaerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan. PMK Nomor 17/PMK.07/2021 juga menugaskan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan kesehatan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belanja prioritas lainnya yang dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit sebesar 8% yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan



- d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan pada beberapa hal diatas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan *refocussing* anggaran melalui perubahan APBD beserta seluruh perubahan penjabarannya sebagai dasar pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19. Adapun Peraturan Bupati Wonosobo (Perbup) penjabaran APBD yang disusun dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut.

Tabel VI.1 Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 Terkait Penanganan Pandemi Covid-19

No.	Tahap Perubahan	Peraturan Bupati	Keterangan
1.	Tahap I (Tanggal 9 April 2021)	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021	Perubahan penjabaran ini dilakukan setelah ditetapkan PMK No.17/PMK.07/2021 yaitu dengan melakukan <i>refocussing</i> beberapa kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19.
2.	Tahap 2 (Tanggal 19 Juli 2021)	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2021	Perubahan penjabaran ini dilakukan setelah ditetapkan PMK No.17/PMK.07/2021 yaitu dengan melakukan <i>refocussing</i> beberapa kegiatan untuk penanganan pandemi Covid-19.

VI.2 Prioritas *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sesuai dengan instruksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyesuaian APBD untuk masing-masing prioritas penanganan pandemi Covid-19 yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial dijelaskan dalam tabel VI.2 berikut ini.

Tabel VI.2 Refocussing dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
A	Penanganan Kesehatan	72.415.635.551,00	50.414.784.902,00	69,62
B	Penanganan Dampak Ekonomi	16.475.000.000,00	5.841.379.630,00	35,46
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	36.361.043.222,00	32.037.753.359,00	88,11
	Jumlah	125.251.678.773,00	88.293.917.891,00	70,49

Berdasarkan Tabel VI.2 diatas menunjukkan bahwa anggaran penanganan pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 sebesar Rp.125.251.678.773,00



dapat terealisasi sebesar Rp.88.293.917.891,00 atau 70,49%. Adapun sumber dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan penanganan pandemi Covid-19 TA 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer Umum sebagaimana digambarkan dalam Tabel VI.3 dibawah ini.

Tabel VI.3 Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
I	Kegiatan yang Bersumber dari PAD			
A	Penanganan Kesehatan	1.828.970.912,00	905.292.598,00	49,50
B	Penanganan Dampak Ekonomi	-	-	-
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	-	-	-
	Jumlah I	1.828.970.912,00	905.292.598,00	49,50
II	Kegiatan yang Bersumber dari DID			
A	Penanganan Kesehatan	3.259.270.000,00	2.936.756.908,00	90,10
B	Penanganan Dampak Ekonomi	-	-	-
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Jumlah II	6.259.270.000,00	5.936.756.908,00	94,85
III	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			
A	Penanganan Kesehatan	67.327.394.639,00	46.572.735.396,00	69,17
B	Penanganan Dampak Ekonomi	16.475.000.000,00	5.841.379.630,00	35,46
C	Penyediaan Jaring Sosial/Social Safety Net	33.361.043.222,00	29.037.753.359,00	87,04
	Jumlah III	117.163.437.861,00	81.451.868.385,00	69,52
	Jumlah (I+II+III)	125.251.678.773,00	88.293.917.891,00	70,49

Sementara itu, rincian program/kegiatan pada OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Lampiran VI.2.

a. Penanganan Kesehatan

Kegiatan penanganan bidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kelurahan dan Kecamatan, Dinsos PMD, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah). Penyediaan dana penanganan pandemic Covid-19 digunakan untuk kegiatan pengadaan obat dan vaksin, dukungan dan fasilitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19, insentif tenaga kesehatan dan sebagainya.. Tabel VI.2 diatas menunjukkan bahwa anggaran penanganan kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1.828.970.912,00 dapat terealisasi Rp.905.292.598,00 atau 49,50%, anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.3.259.270.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.2.936.756.908,00 atau 90,10%, dan anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.67.327.394.639,00 terealisasi Rp.46.572.735.396,00 atau 69,17%. Penjelasan lebih lanjut terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memfasilitasi penanganan kesehatan berdasarkan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat digambarkan dalam tabel VI.4 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel VI.4 Penanganan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
I	Kegiatan yang Bersumber dari PAD			
1	Dinas Kesehatan	1.195.730.000,00	514.143.598,00	43,00
2	Satpol PP	633.240.912,00	391.149.000,00	61,77
	Jumlah I	1.828.970.912,00	905.292.598,00	49,50
II	Kegiatan yang Bersumber dari DID			-
1	Dinas Kesehatan	3.259.270.000,00	2.936.756.908,00	90,10
	Jumlah II	3.259.270.000,00	2.936.756.908,00	90,10
III	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
1	Dinas Kesehatan	62.030.627.439,00	42.042.374.844,00	67,78
2	Kelurahan Wonosobo Barat	45.000.000,00	24.560.000,00	54,58
3	Kelurahan Wonosobo Timur	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
4	Kelurahan Jlamrang	60.000.000,00	56.100.000,00	93,50
5	Kelurahan Kejiwan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
6	Kelurahan Sambek	83.818.600,00	50.559.500,00	60,32
7	Kelurahan Rojoimo	49.002.000,00	22.417.000,00	45,75
8	Kelurahan Mlipak	53.132.850,00	53.132.850,00	100,00
9	Kelurahan Pagerkukuh	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
10	Kelurahan Kramatan	50.000.000,00	14.035.000,00	28,07
11	Kelurahan Tawangsari	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
12	Kelurahan Jaraksari	38.485.000,00	38.485.000,00	100,00
13	Kelurahan Bumireso	38.400.000,00	19.261.800,00	50,16
14	Kelurahan Kaliangit	50.000.000,00	48.723.000,00	97,45
15	Kelurahan Kertek	83.300.000,00	45.720.000,00	54,89
16	Kelurahan Wringinanom	25.000.000,00	6.000.000,00	24,00
17	Kelurahan Selomerto	25.000.000,00	10.559.500,00	42,24
18	Kelurahan Wonorejo	80.000.000,00	71.995.000,00	89,99
19	Kelurahan Leksono	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00
20	Kelurahan Wonoroto	58.200.000,00	58.200.000,00	100,00
21	Kelurahan Kalibeker	90.000.000,00	86.898.250,00	96,55
22	Kelurahan Mudal	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
23	Kelurahan Andongsili	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
24	Kelurahan Garung	95.000.000,00	95.000.000,00	100,00
25	Kelurahan Kajajar	45.280.000,00	35.279.400,00	77,91
26	Kelurahan kalikajar	35.000.000,00	34.591.700,00	98,83
27	Kelurahan Sapuran	50.000.000,00	-	-
28	Kelurahan Kepil	45.539.600,00	45.539.600,00	100,00
29	Kelurahan Kaliwiro	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
30	Kelurahan Wadaslintang	30.840.000,00	30.840.000,00	100,00
31	Kecamatan Sukoharjo	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
32	Kecamatan Leksono	20.000.000,00	13.501.000,00	67,51
33	Kecamatan Wonosobo	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
34	Kecamatan Selomerto	49.720.700,00	41.915.100,00	84,30
35	Kecamatan Kalikajar	95.892.950,00	95.892.950,00	100,00
36	Kecamatan Sapuran	108.076.000,00	73.945.000,00	68,42
37	Kecamatan Mojotengah	100.000.000,00	96.357.302,00	96,36
38	Kecamatan Wadaslintang	87.780.000,00	87.780.000,00	100,00
39	Kecamatan Kaliwiro	178.020.000,00	111.649.000,00	62,72
40	Kecamatan Kalibawang	71.279.500,00	71.279.500,00	100,00
41	Kecamatan Kejajar	85.000.000,00	84.061.900,00	98,90



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
42	Kecamatan Garung	56.000.000,00	26.962.000,00	48,15
43	Kecamatan Watumalang	189.000.000,00	88.288.000,00	46,71
44	Kecamatan Kepil	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
45	Kecamatan Kertek	150.000.000,00	76.583.700,00	51,06
46	Dinas Sosial dan PMD	2.000.000.000,00	1.839.247.500,00	91,96
47	Bagian Kesra	435.000.000,00	435.000.000,00	100,00
	Jumlah III	67.327.394.639,00	46.572.735.396,00	69,17
	Jumlah (I+II+III)	72.415.635.551,00	50.414.784.902,00	69,62

b. Penanganan Dampak Ekonomi

Penanganan dampak ekonomi Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (Dispaperkan) serta Disnakerintrans. Penanganan dampak ekonomi dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan UMKM, subsidi pertanian, dan pelatihan bagi pencari kerja. Pada tabel VI.2 di atas menunjukkan bahwa anggaran penanganan dampak ekonomi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.16.475.000.000,00 dapat terealisasi Rp.5.841.379.630,00 atau 35,46%, Untuk lebih jelasnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang memfasilitasi penanganan dampak ekonomi dapat digambarkan dalam tabel VI.5 berikut ini.

Tabel VI.5 Penanganan Dampak Ekonomi Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	TA 2021		Penyerapan (%)
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
I	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
1	Disdagkop UKM	12.832.000.000,00	2.498.586.980,00	19,47
2	Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan	1.325.000.000,00	1.024.792.650,00	77,34
3	Disnakerintrans	2.318.000.000,00	2.318.000.000,00	100,00
	Jumlah	16.475.000.000,00	5.841.379.630,00	35,46

c. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net

Pencegahan dan penanganan bidang sosial Pemerintah Kabupaten Wonosobo dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DinsosPMD) dan Dikpora, kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dan penanganan khusus bagi kelompok rentan. Berdasarkan Tabel VI.2 diatas menunjukkan bahwa anggaran penyediaan jaring pengaman sosial/Social Safety Net Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 bersumber dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp.3.000.000.000 terealisasi Rp.3.000.000.000,00 atau 100% dan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH)/Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.33.361.043.222,00 dapat terealisasi sebesar Rp.29.037.753.359,00 atau 87,04%, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang memfasilitasi penyediaan jaring pengaman sosial dapat digambarkan dalam tabel VI.6 berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Tabel VI.6 Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/Social Safety Net Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
II	Kegiatan yang Bersumber dari DID			-
1	Dinsos dan PMD	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Jumlah I	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
III	Kegiatan yang Bersumber dari DBH/DAU			-
1	Dikpora	33.116.043.222,00	28.992.753.359,00	87,55
2	Dinsos dan PMD	245.000.000,00	45.000.000,00	18,37
	Jumlah II	33.361.043.222,00	29.037.753.359,00	87,04
	Jumlah (I+II)	36.361.043.222,00	32.037.753.359,00	88,11

VI.3 Penerimaan Hibah Barang Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga menerima hibah barang baik dari perusahaan swasta, perusahaan daerah maupun lembaga masyarakat. Penerapan pendapatan atas penerimaan uang/barang dari masyarakat Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hibah barang tersebut dapat diterima dan ditatausahakan oleh pengurus barang pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Rincian OPD di lingkungan Kabupaten Wonosobo yang menerima hibah barang dari masyarakat dapat digambarkan dalam tabel VI.7 berikut ini.

Tabel VI.7 Penerimaan Hibah Barang dari Masyarakat pada OPD Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021

No	Uraian		No. BAST	Nama Barang	Hibah Yang Diterima		Jumlah (Rp.)
(1)	Penerima Hibah	Pemberi Hibah	(3)	(4)	Volume	Satuan	(7)
1	Bagian Kesra	BPD Bank Jateng	466/0016/2021	Paket sembako	400	paket	17.000.000,00
2	Bagian Kesra	PT. Sentralsari Primasentosa	1466/0053/2021	Air Mineral	20	paket	480.000,00
3	Bagian Kesra	UD Hana	466/0038/2021	APD	48	pcs	3.200.000,00
	Bagian Kesra			Sarung tangan	10	pcs	
4	Bagian Kesra	PT. Bhakti Husada	466/0039/2021	Beras	250	kg	2.500.000,00
5	Bagian Kesra	BAZNAS	466/0057/2021	Beras	7.325	kg	73.250.000,00
6	Bagian Kesra	PT. Tambi PT. BKK	466/0017/2021	Beras	500	kg	5.000.000,00
7	Bagian Kesra	Jateng Cab Wonosobo PT. Tirta	466/019/2021	Beras	200	kg	2.000.000,00
8	Bagian Kesra	Investama (Aqua)	466/021/2021	Beras	500	kg	5.000.000,00
9	Bagian Kesra	Masyarakat Tionghoa Wonosobo	466/0029/2021	Blood Plasma Freezer	1	unit	1.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian		No. BAST	Nama Barang	Hibah Yang Diterima		Jumlah (Rp.)
	Penerima Hibah	Pemberi Hibah			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Bagian Kesra	PT. BRI Cab Wonosobo Masyarakat	B.2502-KC.VII/LOG/07/2021	Beras	2.000	kg	20.000.000,00
11	Bagian Kesra	Tionghoa Wonosobo	466/0030/2021	Beras	2.000	kg	20.000.000,00
12	Bagian Kesra	Masyarakat Tionghoa Wonosobo Masyarakat	BAST-PAKETPEDULICOVID19	Beras	1.000	kg	100.000.000,00
13	Bagian Kesra	Tionghoa Wonosobo	BAST-PAKETPEDULICOVID19	Masker medis	20.000	pcs	20.000.000,00
14	Bagian Kesra	PDAM Wonosobo	466/0010/2021	Beras	2.000	kg	20.000.000,00
15	Bagian Kesra	Bank mandiri KCP Wonosobo	466/0011/2021	Beras	100	kg	1.000.000,00
16	Bagian Kesra	Geodipa Energi	466/0013/2021	Beras	1.000	kg	10.000.000,00
17	Bagian Kesra	PT. Bima Iukar	466/0014/2021	Beras	50	kg	500.000,00
18	Bagian Kesra	PT. Global darma Asri	466/0015/2021	Beras	1.000	kg	10.000.000,00
19	Bagian Kesra	PD BPR Bank Wonosobo	466/0015/2021	Beras	1.500	kg	15.000.000,00
20	Bagian Kesra	PD BPR BKK Wonosobo	466/0012/2021	Beras	100	kg	1.000.000,00
21	RSUD Setjonegoro	Satgas Covid Prov. Jateng	447/106/5	Oxygen Concentrator	2	unit	27.000.000,00
22	RSUD Setjonegoro	Kemenko Marvest	440/1226/2021	Oxygen Concentrator	50	unit	989.490.000,00
JUMLAH							2.342.420.000,00

VI.4 Perubahan APBD terkait *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Penanganan Pandemi Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan perubahan APBD untuk penyediaan dana penanganan pandemi Covid-19 sebesar 25% dari Dana Transfer Umum untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi dan anggaran dari DBH/DAU sebesar 8% untuk kegiatan penanganan kesehatan dan belanja prioritas lainnya. Uraian lebih jelasnya mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo TA 2021 dapat digambarkan dalam Lampiran VI.1.